

**Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja
Perusahaan
PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep**

Astri Furqani

(as3oke_dech@yahoo.com)

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Krisis yang terjadi di Indonesia ini menurut para praktisi pakar ekonomi disebabkan oleh belum adanya atau lemahnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan-perusahaan. Pelanggaran prinsip-prinsip GCG terjadi karena lemahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, minimnya peraturan akan batasan antara hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan, serta tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis, adanya investasi berlebihan, kurang atau menurunnya produktivitas perusahaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan kinerja perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kinerja perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep. Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep sudah diterapkan walaupun masih belum sepenuhnya khususnya pada prinsip *accountability* dan *responsibility*, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat secara nyata, dari beberapa hasil perhitungan terhadap aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi memiliki total skor 83,5. Berdasarkan perhitungan di atas berarti terdapat pada kelompok “AA yang tolak ukurnya antara 80-95”, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Sumenep termasuk dalam kategori Sehat.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance* (GCG), Kinerja Perusahaan

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu istilah yang sudah tidak asing lagi. Di Indonesia istilah ini sudah menjadi bahan diskusi yang serius, sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997. Krisis yang terjadi di Indonesia ini menurut para praktisi pakar ekonomi disebabkan oleh belum adanya atau lemahnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan-perusahaan. Pelanggaran prinsip-prinsip GCG terjadi karena lemahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, minimnya peraturan akan batasan antara hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan, serta tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis, adanya investasi berlebihan, kurang atau menurunnya produktivitas perusahaan. Kalangan bisnis menafsirkan GCG hanya sebatas

bagaimana perusahaan agar dapat meningkatkan laba yang besar, penempatan manajer dan karyawan serta pembagian kekuasaan.

Pengelolaan perusahaan pada PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai pedoman bagi pengelolaan perusahaan agar lebih baik lagi misalnya : mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan disiplin dan pengawasan serta mendorong efisiensi perusahaan. Penerapan GCG juga akan memberikan arahan bagi PT. Pos Indonesia (Persero) dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dunia bisnis.

Laporan keuangan mengungkapkan bagaimana kondisi PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep saat ini. Pengungkapan laporan keuangan yang transparan dan akurat menjadi informasi yang sangat penting bagi investor, apakah investor akan menanamkan modalnya atau memberikan pinjaman pada perusahaan. Akan tetapi, laporan keuangan hanya menyajikan data-data keuangan saja, data-data non keuangan tidak tergambar didalamnya. Dengan adanya prinsip-prinsip GCG, dapat digunakan sebagai alat untuk menggambarkan data non keuangan yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan kinerja perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kinerja perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep.

Ada banyak definisi untuk *Good Corporate Governance* (GCG) menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang dikutip oleh Imam S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2001:2), adalah “ *Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The board managers, shareholders and other stakeholder, and spells put the rule and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*”

Adapun pengertian lain yang dikeluarkan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, yaitu “Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengaruh pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *Good Corporate Governance* diperjelas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-

MBU/2002 pasal 1 mengenai praktik *Good Corporate Governance*. Pengertian *Good Corporate Governance* berdasarkan keputusan ini adalah “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Untuk melaksanakan GCG maka harus dipenuhi prinsip-prinsip dasarnya. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002, terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa beraturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholder* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Aspek Keuangan

7. Aspek Operasional

8. Aspek Administrasi

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISA

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan keadaan responden dengan cara menguraikan data umum hasil penelitian kedalam bentuk angka/persentase dengan tabel. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

Teknik Analisa Data dilakukan melalui cara interview terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG serta menganalisa kinerja perusahaan dengan menilai tingkat kesehatan BUMN sesuai dengan Kepmen BUMN No. Kep-100/MBU/2002 yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi selama dua tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

Prinsip *Good Corporate Governance* GCG di PT. Pos Indonesia (Persero).

PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Sumenep merupakan salah satu cabang dari perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, maka dari itu perusahaan dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan dinamika organisasi dan pelayanan yang lebih kepada masyarakat, oleh sebab itu PT. Pos Indonesia (Persero) perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sebenarnya pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2001, keputusan yang dikeluarkan oleh Komisaris PT. Pos Indonesia No. 518/S-KU/2000 tanggal 2 Oktober, tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menstrukturisasi pembentukan tim perumus panduan *Good Corporate Governance* No. 520/S-KU.

Analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep

i. Transparansi (*Transparency*)

PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep menyajikan laporan keuangan tahunan yaitu yang sesuai dengan ketentuan yang ada di PT. Pos Indonesia, yaitu meliputi Laporan Laba/Rugi Kompherensif Induk Perusahaan per 31 Desember, Laporan Posisi Keuangan Induk Perusahaan per 31 Desember, Rekap Daftar Penerimaan Pendapatan per bulan, Rekap Daftar Pengeluaran Pendapatan dan biaya perbulan.

Hal ini membuktikan bahwa prinsip *transparency* di PT. Pos Indonesia (Persero) sumenep sudah diterapkan, yang mana tansparansi ini sangat perlu dikarenakan sebagai sumber informasi bagi pihak luar (*stakeholder*), investor, pemegang saham, kreditor serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan.

ii. Kemandirian (*Independency*)

PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep menggunakan staf ahli setiap divisi perusahaan yang kemudian hasil kinerjanya dilaporkan ke pusat, hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1998 tentang perseroan. Yang dalam hal ini menekankan bahwa didalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan divisi masing-masing.

iii. Akuntabilitas (*Accountability*)

PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep belum menerapkan sistem desentralisasi. Ini dapat dibuktikan dengan pendelegasian pengambilan keputusan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep diputuskan oleh perusahaan pusat. Dengan demikian dalam memutuskan suatu kebijakan atau ketetapan dipengaruhi oleh perusahaan pusat. PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep setiap tahunnya dikontrol oleh internal audit, namun lain dari itu, untuk eksternal audit tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

iv. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Melalui wawancara didapat bahwa pengelolaan perusahaan diselenggarakan berdasarkan etika bisnis sehat dan universal, PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep juga aturan-aturan serta kebijakan yang didalamnya berisi tentang ancaman dan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan *Good Corporate Governance*, akan tetapi pelaksanaan aturan tersebut dirasa masih perlu ditingkatkan. Bentuk-bentuk ancaman dan sanksi bergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan, seperti :

- a. Sanksi terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran yang kaitannya dengan disiplin kerja karyawan.
- b. Tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.
- c. Ancaman proses hukum publik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v. Kewajaran (*Fairness*)

Secara umum prinsip kewajaran yang ada di PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep menjunjung tinggi persamaan hak-hak, hal ini terbukti bahwa PT. Pos Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dapat menunjukkan informasi material yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi yang relevan tentang perusahaan secara tepat waktu dan berkala kepada publik.

Kinerja Keuangan Perusahaan

1. Aspek Keuangan

a. *Return On Equity* (ROE)

Besarnya laba setelah pajak pada tahun 2010 sebesar Rp. 397.909.642 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 506.301.710 sedangkan besarnya modal sendiri (ekuitas) pada tahun 2010 sebesar Rp. 757.607.070 dan pada tahun 2011 Rp. 397.909.642 sehingga ROE pada tahun 2010 sebesar 52,52% dan pada tahun 2011 sebesar 61,87%. Dari perhitungan ROE pada

tahun 2010 dan 2011 yang besarnya > 15% maka dari pemberian skor pada *Return on Equity* adalah 20.

b. *Return on Investment (ROI)*

Besarnya laba setelah pajak (laba bersih) pada tahun 2010 sebesar Rp. 397.909.642 dan pada tahun Rp. 2011 506.301.710 sedangkan besarnya total aktiva pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.893.051.028 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.237.569.613 sehingga besarnya ROI pada tahun 2010 sebesar 21,02% dan 22,63% pada tahun 2011.

Dengan melihat besarnya ROI > 18%, maka untuk penilaian skor *Return on Investment* yaitu sebesar 15

c. *Rasio Kas /Cash Ratio*

Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep antara kas dan bank ditambah surat berharga dengan hutang lancar pada tahun 2010 mempunyai besar rasio 155,20% sedangkan pada tahun 2011 sebesar 153,59% dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan melihat besarnya rasio kas 2010 dan 2011 yang berada pada kisaran ≥ 35 maka skor untuk Rasio kas pada perusahaan sebesar 5

d. *Rasio Lancar/Current Ratio*

Besarnya aktiva lancar pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.401.051.028 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.741.314.613 sedangkan besarnya hutang lancar pada tahun 2010 sebesar Rp. 580.577.151 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 725.721.439 sehingga besarnya *current ratio* pada tahun 2010 sebesar 241,32% dan 239,94% pada tahun 2011.

Dengan melihat besarnya *current ratio* $\geq 125\%$, maka untuk penilaian skor yaitu sebesar 5

e. *Total Piutang Usaha /Collection Periods*

Berdasarkan atas perhitungan pada tabel 1, dapat ditemukan *Collection Periods* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep, pada tahun 2010 sebesar 9,67 (10 hari) sedangkan pada tahun 2011 sebesar 9,82 (10 hari) hal tersebut menunjukkan bahwa penagihan hutang pada tahun 2011 tetap. Maka skor pada tahun 2011 menurut tingkat CP yaitu 5 dan perbaikan CP yaitu 0 hari dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 5.

Tabel 1

Collection Periods

Tahun	Total Piutang	Total Pendapatan	CP=x	Selisih
-------	---------------	------------------	------	---------

	Usaha	Usaha	(hari)	
2010	90.175.620	3.401.870.134	9,67	
2011	114.450.075	4.252.337.668	9,82	0 Hari

(Sumber data : diolah oleh peneliti)

f. Perputaran Persediaan (PP)

Berdasarkan data keuangan yang didapat dari objek menunjukkan bahwa pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep yang bergerak dibidang usaha jasa tidak terdapat perhitungan persediaan, jika dinilai skor untuk perputaran persediaan adalah 0.

g. Perputaran Total Aset /*Total Asset Turn Over* (TATO)

Tingkat perputaran total aset lebih dari 120 atau skornya sebesar 5 sedangkan perbaikan Total Asetnya mengalami penurunan (selisih) sebesar (10,7) atau skor sebesar 1,5 maka dalam hal ini dipilih skor yang lebih besar yaitu 5

h. Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Pada tahun 2010 rasio modal sendiri sebesar 40,02% kemudian mengalami Penurunan 36.57% pada tahun 2011 Dengan meihat besarnya rasio TMS terhada total aset yang berada pada $30 \leq x \leq 40$, maka jika diberikan skor untuk total modal sendiri terhadap total aset adalah 10.

Tabel 2
Perputaran Total Aset

Tahun	Total Pendapatan bersih	Total Aktiva	TATO=x (%)	Selisih
2010	3.387.896.303	1.893.051.028	178,96	
2011	4.243.785.037	2.237.569.613	189,66i	(10.7)

(Sumber data : diolah oleh peneliti)

Tabel 3
Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	TMS pd TA
2010	757.607.070	1.893.051.028	40.02%
2011	818.264.665	2.237.564.613	36.57%

(Sumber data : diolah oleh penulis)

Berikut penentuan Bobot untuk Aspek keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep.

Tabel 4

Indikator	Bobot
	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	15
3. Rasio Kas	5
4. Rasio Lancar	5
5. Colection Periods	5
6. Perputaran persediaan	0
7. Perputaran total aset	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	10
Total Bobot	65

Dari perhitungan bobot dari setiap indikator pada aspek keuangan perusahaan sebagai tolak ukur tingkat kesehatan BUMN maka PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep mempunyai keseluruhan total bobot untuk aspek keuangan 65.

2. Aspek Operasional

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Indikator yang digunakan adalah pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta *research & development*. Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh skor sebesar 14,5 dengan kata lain dikategorikan cukup atau masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.

3. Aspek Administrasi

a. Laporan Perhitungan Tahunan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bagian keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep, didapat bahwa laporan periodik tahunan tidak berlangsung secara rutin pada waktu yang sama, sumber mengatakan audit ekstern jarang dilakukan, setiap tahunnya hanya auditor intern yang datang mengauditnya, sehingga penyampaian laporan tahunan terjadi keterlambatan sampai dengan bulan ke lima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup. Maka skor untuk laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

Sesuai wawancara dan pengolahan data yang didapat oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa akibat dari laporan perhitungan tahunan mengalami keterlambatan maka Rancangan RKAP juga mengalami keterlambatan 25 hari sebelum memasuki tahun anggaran, maka skornya adalah 0.

c. Laporan Periodik

Laporan periodik triwulan dalam penyerahannya mengalami keterlambatan 40 hari dari akhir periode laporan, maka skornya adalah 1.

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil

PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep yang merupakan perusahaan induk, oleh perusahaan pusat tidak diberikan wewenang desentralisasi dalam penyaluran dana, setiap kegiatan kinerjanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan pusat. Maka dari hal pembinaan usaha kecil diberikan skor 0. Maka pada aspek administrasi dapat dijelaskan bobot keseluruhan pada tabel 5

Total bobot Aspek Administrasi PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep adalah 4. Jika dijumlahkan dari semua hasil penghitungan baik dari Aspek Keuangan, Aspek Operasional maupun Aspek Administrasi terdapat beberapa indikasi yang kurang baik serta mengalami penurunan, hal ini dapat dijadikan salah satu indikator bahwa kinerja perusahaan mengalami penurunan.

Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan suatu acuan dalam menentukan penerapan sistem yang baik, terkecuali didukung dengan pemberian skor dari setiap indikasi rasio yang terdapat pada *Good Corporate Governance* yang nantinya dapat ditemukan bobot PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep, maka hasil analisa dan perhitungan terhadap Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi dapat diberikan nilai sebagai berikut:

- vi. Total bobot Aspek keuangan adalah 65,
 - vii. total bobot aspek operasional adalah 14,5 dan
 - viii. total bobot aspek administrasi adalah 4
- jumlah keseluruhan dari ketiga aspek adalah 83,5

Tabel 5

Indikator	Bobot
	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	2
2. Rancangan RKAP	0
3. Laporan Periodik	1
4. Kinerja PUKK	0
TOTAL	4

(Sumber data : diolah oleh penulis)

“sesuai dengan jumlah keseluruhan ketiga aspek tersebut maka diperoleh nilai AA yang tolak ukurnya antara 80-95” atau masuk dalam kategori Sehat.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep sudah menerapkan walaupun masih belum sepenuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan-perbaikan didalam penerapan prinsip *accountability* dan *responsibility* sehingga dapat menunjang peningkatan kinerja baik di aspek keuangan, aspek operasional, maupun aspek administrasi.

KESIMPULAN

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Sumenep sudah diterapkan walaupun masih belum sepenuhnya khususnya pada prinsip *accountability* dan *responsibility*, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat secara nyata, dari beberapa hasil perhitungan terhadap Aspek keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi memiliki total skor 83,5. Berdasarkan perhitungan di atas berarti terdapat pada kelompok “AA yang tolak ukurnya antara 80-95”, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan PT.Pos Indonesia (persero) Cabang Sumenep termasuk dalam kategori Sehat.

Untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan maka hendaknya PT.Pos Indonesia dapat menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan selalu melakukan evaluasi. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dan *Research & Development* sehingga dapat menunjang penerapan prinsip-prinsip GCG.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*.
- Boediono, Gideon SB. *Kualitas Laba: Study Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo : 15-16 September 2005.
- Hanafi. Mahmuda, dan Halim Abdul. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Midiastuty, Pranata dan M. Machfoedz. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya : 16-17 Oktober 2003.
- Sugiyono dkk, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Ujiyantho, Arief dan Pramuka, Bambang Agus. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar: 26-28 Juli 2007.
- Veronica, Sylvia Dkk. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Pesahaan, dan Praktik Corporate Governance Terhadap Pegelolaan Laba (Earning Management)*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo: 15-16 September 2005.
- Zarkasyi, Ak. Dr. H. Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada perusahaan Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- [/http://www.fcgi.co.id](http://www.fcgi.co.id). *Forum for Corporate Governance in Indonesia*.